



# **BUKU HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## **IMPLEMENTASI 18 REVOLUSI PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **TIM PENYUSUN**

- Penanggungjawab : **H. Andi Bukti Djufrie, SP, M.Si**  
*(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar)*
- Ketua Tim Penyusun : **Muhammad Amri, S.STP, M.Ap**  
*(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah)*
- Anggota : Andi Suliana, SP  
Rachmatan, ST  
Ismaniar Ismail, S.Sos, M.Si  
Ifrah, ST, M.Si
- Pelaksana : St. Nur Asisyah, SKM  
Dra. Jumiati Majid
- Tata Usaha : Andi Mutia, SE  
Faisal
- Alamat Redaksi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar-Kantor Walikota Makassar Lantai 2  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No, 2 Makassar  
Kode Pos - 90111



## **SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan dan menuntaskan Penelitian dan pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik bagi permasalahan yang ada di Kota Makassar.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak Februari 2022 hingga September 2022. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari setiap penelitian dalam buku ini kami harapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Makassar.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Makassar yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada Balitbangda Kota Makassar untuk melaksanakan penelitian-penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah atas upaya dan kerja kerasnya dalam menuntaskan tugasnya sejak tahap perencanaan hingga dengan penyusunan laporan hasil penelitian ini.

Makassar,        September 2022

Kepala Badan,

**H. ANDI BUKTI DJUFRIE, SP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690330 199903 1 006

# **IMPLEMENTASI 18 REVOLUSI PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

**Dr. H. Bernard, MS**

**Dr. Ed Faridah, M.Pd**

**Dr. Novayanti Sophia Rukmana, S.Sos., M.Si**

**Dra. Rahmatiah**

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar  
Jl. Andi Pangerang Pettarani

**Andi Suliana, SP**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No, 2 Makassar



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 18 Revolusi Pendidikan sebagai Sebuah Kebijakan Publik .....	4
2.2 Program Revolusi Pendidikan Pemerintah Kota Makassar .....	5
BAB III. METODE PENELITIAN .....	11
3.1 Desain Penelitian.....	11
3.2 Populasi dan Sampel .....	11
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.4 Teknik Analisis Data .....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	13
4.1. Hasil Penelitian .....	13
4.2. Pembahasan .....	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24

# IMPLEMENTASI 18 REVOLUSI PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

## RINGKASAN

Penelitian ini adalah tentang implementasi program 18 revolusi pendidikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Program 18 Revolusi Pendidikan ini dipahami dan diimplementasikan di unit satuan pendidikan. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan dukungan apa yang diperlukan oleh sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Populasi dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Makassar, dan terdapat 44 sekolah yang ikut dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kepala sekolah terhadap tingkat pemahaman mereka berada pada kategori paham dan sangat paham. Menurut kepala sekolah, mereka memahami 18 Revolusi Pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Makassar, namun mereka tidak tahu harus melakukan apa, apa yang dituntut dari sekolah, dan kepada siapa mereka harus melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai 18 Revolusi Pendidikan ini. Secara kuantitatif, kepala sekolah menyatakan bahwa mereka memperoleh dukungan dana, ide, dan pendampingan. Namun hasil wawancara menemukan bahwa pemikiran dan pendampingan yang dimaksud adalah ketika Pemerintah Kota Makassar melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan sedikit menyuarakan kembali tentang Revolusi Pendidikan tersebut. Menurut sekolah, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar hampir tidak pernah memberikan pendampingan khusus terkait implementasi Program Revolusi Pendidikan. Faktor penghambat utama yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi program adalah ketersediaan dana, kemampuan sumber daya sekolah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Menurut kepala sekolah, untuk dapat mengimplementasikan Program Revolusi Pendidikan, sekolah membutuhkan alokasi dana khusus, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, dukungan sarana dan prasarana, termasuk pendampingan implementasi program oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah juga menyatakan tidak terdapat jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam rangka implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan ini.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan pendidikan, 18 Revolusi Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Pernyataan Masalah**

18 program revolusi pendidikan adalah program yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar dan pertama kali diumumkan pada akhir tahun 2015. Revolusi Pendidikan yang berisi 18 program ini terdiri atas: (1) Semua Anak bisa sekolah; (2) Semua adiwiyata; (3) Semua bebas nafza; (4) Sekolah 9 tahun; (5) 100 sekolah bintang 5; (6) Satu sekolah 1 SMART LIBRARY; (7) Satu sekolah 2 guru INOVATOR; (8) Satu sekolah 5 SUPER STUDENT; (9) Satu sekolah 2 SMART CLASS; (10) Satu sekolah 1 SUPER INOVASI; (11) Satu sekolah 5 GANG DEBAT; (12) Satu anak 1 tari; (13) Satu anak 1 bakat; (14) Satu anak 1 olahraga; (15) Satu anak 3 tanaman; (16) Festival Bakat; (17) Olimpiade Sekolah; (18) Liga Debat. Dilansir dari laman Makassar Today, Walikota Makassar Danny Pamanto mengatakan bahwa Revolusi Pendidikan yang digagas tersebut merupakan tonggak pencerahan dunia pendidikan Kota Makassar yang bermuara pada kualitas sumber daya manusia yang unggul (Makassar Today, 2016). Menurut Danny Pamanto, kata “revolusi” digunakan karena Pemerintah Kota Makassar menginginkan adanya perubahan drastis dalam waktu yang cepat, dan ditargetkan terwujud pada tahun 2020. 18 Program Revolusi Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan SDM yang mampu bersaing secara global.

Sebagai sebuah program yang digagas oleh Pemerintah Daerah yang implementasinya berada di tingkat sekolah, salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Kota Makassar melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dimana program ini harus dilaksanakan. Selain itu eksplorasi mengenai bagaimana sekolah merespon kebijakan pemerintah daerah juga perlu dikaji untuk melihat keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dikaitkan dengan pelaksanaan di tingkat sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jufri, dkk (2017) menemukan bahwa implementasi 18 revolusi pendidikan sudah dilaksanakan sebagai suatu upaya sadar untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi secara global. Penelitian ini menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk masing-masing komponen yang tercantum dalam 18 program revolusi pendidikan. Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa program revolusi pendidikan harus didukung oleh visi, misi, dan program kerja sekolah yang saling terkait satu sama lain. Salah satu isu strategis yang perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana model implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar khususnya mengenai 18 Program Revolusi Pendidikan.



Penelitian lain dilakukan oleh Kulaeno (2018) tentang inovasi Pemerintah Kota dalam Program Revolusi Pendidikan dalam bentuk studi kasus di SD Negeri Pannampu 1 Kota Makassar. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 4 program revolusi pendidikan yang sudah terlaksana di sekolah tersebut. Faktor penghambat yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara adalah kurangnya sosialisasi, ketersediaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jufri dkk (2017), faktor pendukung implementasi adalah adanya komitmen dari sekolah untuk menindaklanjuti program revolusi pendidikan tersebut.

Kedua penelitian yang disebutkan di atas fokus pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka merespon 18 program revolusi pendidikan. Namun sebagai sebuah program unggulan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kajian tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti gagasan tersebut dan bagaimana sekolah menginisiasi program dan kegiatan belum tampak.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana kebijakan ini dipahami dan diimplementasikan di unit satuan pendidikan, jenjang sekolah menengah pertama. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Bagaimanakah tingkat pemahaman sekolah terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan?
- (b) Bagaimanakah tingkat implementasi sekolah terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan?
- (c) Bentuk dukungan apa yang diperoleh untuk mengimplementasikan program tersebut;
- (d) Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pemahaman sekolah terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan
- b. Tingkat implementasi sekolah terkait 18 Program Revolusi Pendidikan
- c. Bentuk-bentuk dukungan yang diperoleh sekolah untuk mengimplementasikan 18 Program Revolusi Pendidikan
- d. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan

## **1.3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang berbasis data terkait implementasi kebijakan di bidang pendidikan, terutama tentang bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh pelaksana teknis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Proposal ini terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

BAB I yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II yang berisi tinjauan pustaka tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, kebijakan merdeka belajar dan program revolusi pendidikan, dan hasil-hasil penelitian terkait.

BAB III memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian yang diperoleh, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2. 1. 18 Program Revolusi Pendidikan sebagai Sebuah Kebijakan Publik.**

UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 menjelaskan bahwa “*pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya*”. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran adalah “*proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar*” (pasal 1). Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa “*Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan*”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016, yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah “*tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah*” (pasal 1). Selanjutnya dalam pasal 10 dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ini dilakukan melalui “*mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu*” (Mendikbud, 2016, pasal 1). UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 11 ayat 1 juga menjelaskan bahwa “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*”.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik di pemerintah pusat maupun daerah, harus sejalan dengan amanah undang-undang, bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik, karenanya dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama pemerintah dan sekolah sebagai unit pelaksana teknis. Terdapat keterkaitan antara standar satu dengan yang lainnya. Kompetensi dan kreativitas kepala sekolah, dukungan dari dinas pendidikan, komitmen guru, adalah beberapa faktor kunci yang berpengaruh terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan ini.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu adalah melalui 18 Program Revolusi Pendidikan. Gerakan 18 Revolusi Pendidikan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan publik diikatkan

dengan konsep kebijakan publik. Menurut Wahab (2016), terdapat 4 ciri kebijakan publik, yaitu:

- 1) Tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu
- 2) Merupakan tindakan yang saling terkait dan berpola
- 3) Dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Program Revolusi Pendidikan merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar. Sebagai sebuah kebijakan, kajian tentang apa sebenarnya isi dan maksud dari Revolusi Pendidikan ini perlu untuk dilakukan. Wahab (2016) menuliskan bahwa salah satu alasan mengapa kajian terhadap kebijakan publik itu perlu dilakukan adalah karena alasan politik. Menurutnya, kebijakan publik perlu dipelajari agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat, agar dapat mencapai tujuan yang juga tepat. Lebih lanjut dituliskan bahwa studi kebijakan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah.

## **2.2. Program Revolusi Pendidikan Pemerintah Kota Makassar.**

Menurut Bacchi (2009), kebijakan adalah tentang merencanakan perubahan. Karenanya, setiap kebijakan pasti secara implisit mengemukakan hal yang dianggap masalah terkait kebijakan yang dikeluarkan. Program yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar yang diberi nama 18 Program Revolusi Pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

18 Revolusi Program Pendidikan merupakan kebijakan turunan dari visi dan misi Kota Makassar “Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua” yang berlandaskan kearifan lokal (Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2017). Lebih lanjut dituliskan bahwa Revolusi Pendidikan diharapkan mampu mengubah paradigma pendidikan yang dapat berorientasi pada kemandirian dan modernisasi berbasis kearifan lokal pada proses pendidikan yang diberikan. Tujuannya adalah agar pendidikan dapat menghasilkan anak bangsa yang mampu berkompetisi, memiliki daya saing, dan dapat berperan sebagai innovator yang mandiri dan berdaya guna. Menurut Disdik Kota Makassar (2017), Revolusi Pendidikan sebagai sebuah kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan yang menggambarkan bentuk keberpihakan pemerintah Kota Makassar dalam upaya membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama.

Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing program berdasarkan Buku 18 Program Revolusi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2017.

1) Semua Anak Bisa Sekolah;

Program Semua Anak Bisa Sekolah menekankan bahwa setiap anak bisa sekolah tanpa diskriminasi. Program ini juga berupaya untuk merespon kebutuhan anak dalam rangka menjadikan Kota Makassar sebagai kota layak anak. Program ini juga bertujuan membantu anak jika mereka mengalami permasalahan terkait pendidikan mereka.

2) Semua Adiwiyata

Program Semua Adiwiyata diharapkan agar setiap warga sekolah dapat terlibat untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

3) Sekolah Bebas Nafza

Program ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan melalui penegakan disiplin bagi anak serta tamu yang berkunjung. Sekolah juga diharapkan senantiasa melakukan pengawasan terhadap anak, dan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengeledahan tas anak.

4) Sekolah 9 tahun

Program sekolah terintegrasi 9 tahun bertujuan untuk memberikan peluang terjadinya interaksi sosial di antara peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

5) 100 Sekolah Bintang 5

Sekolah Bintang 5 adalah sekolah yang diharapkan memiliki desain, fasilitas dan layanan pendidikan yang merespon perkembangan zaman dan teknologi. Sekolah Bintang 5 ini biasa juga disebut dengan istilah Smart School.

6) Satu Sekolah 1 Smart Library

Program ini bertujuan agar sekolah mampu menyediakan perpustakaan yang berbasis teknologi dan informasi agar guru dan siswa dapat mengakses informasi terkini dan aktual melalui sumber belajar yang tersedia.

7) Satu Sekolah Guru Inovator.

Program ini bertujuan untuk mengembalikan kembali peran guru sebagai tempat untuk bertanya, keteladanan, nilai, dan guru yang memiliki inovasi agar siswanya punya pandangan ke depan.

8) Satu Sekolah 5 Super Student

Program ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang dapat menjadi tauladan bagi siswa lainnya. Program ini juga bertujuan untuk mengakomodir berbagai tipe kecerdasan yang dimiliki oleh anak, yang bisa jadi berbeda antar satu anak dan lainnya, bahwa sekolah bukan hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga yang terkait dengan kecerdasan intelektual dan sosial.

9) Satu Sekolah 2 Smart Class

Program Smart Class fokus pada ketersediaan sumber belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar dengan memanfaatkan informasi dari dunia maya dan sumber belajar yang berbasis digital.

10) Satu Sekolah 1 Super Inovasi

Sekolah super inovasi adalah sekolah yang menjadi model dan rujukan bagi sekolah lain yang sifatnya unik dan berbeda dibandingkan sekolah lainnya. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah proses pembelajaran yang dianggap terkini dan sifatnya aktual.

11) Satu Sekolah 5 Gang Debat

Program ini bertujuan agar sekolah dapat memfasilitasi siswa agar mampu mengemukakan pendapat, ide, dan saran yang sifatnya membangun. Hal-hal tersebut diharapkan dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab melalui Gang Debat yang disediakan oleh sekolah.

12) Satu Anak 1 Tari

Program ini adalah tentang menumbuhkembangkan kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan publik / masyarakat umum. Siswa juga diharapkan mampu mengekspresikan keahlian dan keterampilan yang dia miliki secara terbuka. Sekolah diharapkan dapat mendorong munculnya hal tersebut melalui seni tari.

13) Satu Anak 1 Bakat

Program ini mengharapkan sekolah agar dapat memfasilitasi siswanya untuk menyalurkan inspirasi dan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bakatnya.

14) Satu Anak 1 Olahraga

Program ini bertujuan agar sekolah dapat membantu siswanya untuk aktif berolahraga sesuai dengan minatnya dan disesuaikan dengan daya dukung yang dapat dilakukan oleh sekolah. Tujuannya adalah agar anak tetap sehat dan bugar dalam mengikuti proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas.

15) Satu Anak 3 Tanaman

Tujuan dari program ini adalah agar siswa dapat memahami fase kehidupan melalui tanaman yang dirawatnya di sekolah. Tujuannya agar siswa dapat mengerti tentang fase

kehidupan yang dialaminya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat menjadi teladan bagi siswa lainnya.

#### 16) Festival Bakat

Festival Bakat merupakan ajang yang diperuntukkan bagi siswa yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Festival Bakat ini dapat dilakukan baik di tingkat kecamatan, tingkat Kota Makassar, maupun tingkat nasional.

#### 17) Olimpiade Sekolah

Program pelaksanaan olimpiade sekolah bertujuan agar sekolah dapat menjadi pusat studi dan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang dilakukan oleh komunitas sekolah. Olimpiade sekolah diharapkan menjadi ajang kompetisi antar siswa dan antar sekolah.

#### 18) Liga Debat

Program Liga Debat bertujuan agar sekolah dapat memfasilitasi munculnya kreativitas dan sikap kritis serta kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jufri dkk (2017) dan Kulaeni (2018) memperlihatkan bahwa Program Revolusi Pendidikan yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar ini memberikan arah dan panduan bagi pengembangan sekolah, khususnya pendidikan dasar dan menengah di Kota Makassar. Namun, hasil wawancara dari penelitian ini memperlihatkan bahwa 18 Program Revolusi Pendidikan ini memang menjadi acuan, tetapi sekolah merasa kurang memperoleh dukungan tentang bagaimana menindaklanjuti program revolusi pendidikan ini, termasuk yang terkait dengan pengorganisasian program sekolah.

Idris dan Lestari (2017) melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Makassar pengaruh pengorganisasian program sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pengorganisasian program sekolah memberikan pengaruh sekitar 50% terhadap mutu pendidikan di unit satuan pendidikan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa menurut guru, aspek pengorganisasian di sekolah hanya berada pada kisaran 58.82%, yang berarti berada pada kategori rendah, yaitu tidak tersedianya pembagian tugas yang jelas dan kinerja tenaga kependidikan yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Secara umum, yang dimaksud dengan pengorganisasian dalam penelitian ini adalah bagaimana kepala sekolah melakukan pembagian tugas, pengelompokan pekerjaan, koordinasi, pemantauan dan re-organisasi sumber daya manusia di sekolah (lihat Idris & Lestari, 2017, hal. 24 – 25). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian program sekolah memegang peranan penting dalam pengelolaan sekolah

yang berkualitas. Dan kompetensi kepala sekolah memegang peranan penting dari sudut pandang ini.

Pada 18 Program Revolusi Pendidikan, terdapat 4 program yang menjadi bahan diskusi di kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan, yaitu (1) SMART LIBRARY, (2) GURU INOVATOR, (3) SMART CLASS, dan (4) SUPER INOVASI. Sebagai sebuah program, beberapa komponen dari program ini dapat dengan mudah untuk dipahami. Namun untuk beberapa program, kriteria dan indikator dari program tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, termasuk 4 komponen yang disebutkan di atas. Berikut adalah kajian tentang 4 program Revolusi Pendidikan yang kelihatan berbeda dan unik dibandingkan dengan program lainnya.

### **Smart Library**

Secara umum, konsep tentang smart library ini mengarah kepada pengembangan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi, baik dari layanan yang diberikan maupun dari sumber belajar yang tersedia. Seperti yang dijelaskan oleh Aithal (2016), bahwa terdapat pergeseran tentang apa yang dimaksud dengan perpustakaan. Konsep perpustakaan yang biasanya terdiri atas buku-buku dalam bentuk fisis, jurnal dan surat kabar, mengalami perubahan ke dalam bantu elektronik, atau biasa dikenal dengan istilah digital. Sehingga menurutnya, perpustakaan sekarang berubah menjadi “*Resource Centres with online facility to provide resource sharing services to its registered users*” (Aithal, 2016, hal. 693), yang jika diterjemahkan berarti sumber belajar dengan menggunakan fasilitas online yang menyediakan jaringan layanan yang bisa digunakan bersama.

Aithal (2016) menuliskan dengan cukup rinci membandingkan antara perpustakaan konvensional dan perpustakaan dalam ruang digital, dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang untuk melakukan inovasi terhadap perpustakaan yang masih konvensional. Bahkan dalam penelitian lain, fokusnya bukan lagi terkait digitalisasi sumber belajar, tetapi juga yang terkait dengan desain ruang perpustakaan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh Ramkumar, dkk (2020). Penelitian yang mereka lakukan contohnya tentang desain sistem pengontrolan cahaya yang bersifat otomatis dengan menggunakan control suara dan notifikasi melalui *google assistant*. Aspek lain yang juga diteliti mengenai identifikasi peminjam buku melalui kartu mahasiswa dan identifikasi buku yang dilakukan melalui sistem *barcode*. Dengan demikian terlihat bahwa konsep dasar smart library ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi terkait sumber belajar, desain Gedung/ruang perpustakaan, dan sistem layanannya.



## **Guru Inovatif**

Guru yang inovatif dari program revolusi pendidikan Pemerintah Kota Makassar tentu memiliki indikator tersendiri. Salah satu definisi yang bisa digunakan mengenai guru yang inovatif ini bisa dikaitkan dengan *innovative teaching*. Menurut Pollock, dkk (2021), Inovasi tidak hanya berarti melakukan sesuatu yang baru. Inovasi adalah tentang memikirkan cara baru untuk memperbaiki luaran, metode, atau ide. Menurut mereka, terdapat terdapat 3 hal yang yang perlu dilakukan oleh guru untuk melakukan pengajaran yang inovatif, yaitu: (1) ajarkan pengetahuan deklaratif yang membuat siswa selalu mengingatnya; (2) ajarkan keterampilan berpikir secara eksplisit; dan (3) gunakan teknologi untuk memaksimalkan akses informasi.

## **Smart Class**

Menurut Jo, dkk (2015), *smart class* adalah kelas yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi, saling berbagi dan partisipasi antara guru dan siswa. Jo, dkk (2015) menuliskan bahwa elemen utama yang terkait *smart class* adalah sistem yang menyenangkan, kegunaan yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, dan sikap terhadap kelas. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam *smart class* perlu memperhatikan keempat elemen utama tersebut untuk peningkatan efektivitas *smart class* dalam pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu ciri khas dari smart class. Menurut Tanwar dan Gupta (2014), di era modern ini, smart class merupakan gerakan teknologi baru yang menjadi keharusan bagi setiap sekolah. Smart class merupakan solusi teknologi di dalam kelas yang telah mengubah pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian terlihat bahwa ide tentang smart class ini adalah tentang bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan kajian tentang komponen revolusi pendidikan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian implementasi kebijakan untuk mengetahui bagaimana Program Revolusi Pendidikan ini ditindaklanjuti di tingkat sekolah. Menurut Purnama (2020), penelitian implementasi kebijakan adalah tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sebatas mengidentifikasi program dan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah terkait Program Revolusi Pendidikan, tetapi tentang proses bagaimana 18 Program Revolusi Pendidikan ini ditindaklanjuti di sekolah.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3. 1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan implementasi kebijakan di bidang pendidikan ditindaklanjuti di tingkat sekolah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk dukungan yang diperoleh dan diperlukan oleh sekolah untuk mengimplementasikan program revolusi pendidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi 18 program revolusi pendidikan.

### **3. 2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini kepala SMP Negeri di Kota Makassar. Terdapat 44 kepala sekolah yang mengisi kuesioner dari 58 SMP Negeri yang ada di Kota Makassar

### **3. 3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

#### **a. Survei.**

Survei diberikan kepada kepala sekolah melalui pertemuan langsung dengan melakukan koordinasi dengan forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Terdapat 4 komponen yang diukur didalam survei ini, yaitu:

#### **- Pemahaman terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan**

Item pernyataan untuk aspek ini didesain dalam bentuk pernyataan tertutup, menanyakan kepada responden sejauh mana mereka memahami 18 Program Revolusi Pendidikan di Kota Makassar. Respon pilihan menggunakan skala Likert, dari 1 – 4, dimana 1 = tidak paham; 2 = kurang paham; 3 = paham; 4 sangat paham.

#### **- Implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan di sekolah masing-masing**

Item pernyataan untuk aspek ini didesain dalam bentuk pernyataan tertutup dan terbuka. Responden diminta untuk memberikan penilaian sendiri sejauh mana sekolah telah mengimplementasikan 18 Program Revolusi Pendidikan. Respon pilihan menggunakan skala semantik, mulai dari 0 sampai dengan 6. Selain pilihan tersebut, responden juga diminta untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang telah mereka laksanakan yang menggambarkan skor yang mereka pilih.

#### **- Bentuk dukungan yang telah diperoleh untuk melakukan implementasi**

Kebijakan 18 Program Revolusi Pendidikan dikeluarkan pada akhir tahun 2015. Komponen ini ditanyakan untuk mengetahui bentuk dukungan apa yang telah diperoleh sejak pertama kali kebijakan ini dikeluarkan. Item pernyataan dalam bentuk

daftar cek, dan pertanyaan terbuka untuk membuka memberikan ruang kepada responden menuliskan bentuk dukungan yang diperoleh selain dari yang telah dituliskan.

- **Faktor-faktor yang menghambat Implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan**

Aspek ini menanyakan tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan. Item pernyataan disediakan dalam bentuk daftar pilihan, dan responden juga diberi ruang untuk menuliskan faktor penghambat yang mereka rasakan dan temukan jika tidak tertulis di dalam daftar pilihan yang telah disediakan. Terdapat 10 pilihan yang disediakan pada aspek ini, mulai dari ketersediaan dana, kewenangan, sampai pada kecukupan informasi yang tersedia terkait Program Revolusi Pendidikan.

- **Bentuk-bentuk dukungan yang diperlukan untuk menindaklanjuti 18 Program Revolusi Pendidikan.**

Aspek ini menanyakan tentang bentuk dukungan yang dibutuhkan agar sekolah dapat mengimplementasikan 18 Program Revolusi Pendidikan. Sama seperti aspek sebelumnya, item pernyataan disediakan dalam bentuk pilihan dan ruang untuk menuliskan bentuk dukungan lain yang dibutuhkan selain dari yang telah disediakan.

b. Wawancara Kelompok.

Wawancara kelompok akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah jenjang SMP Kota Makassar. Tujuan wawancara adalah untuk mengeksplorasi tantangan yang dirasakan dan dialami oleh sekolah dalam memahami dan mengimplementasikan 18 Program Revolusi Pendidikan ini.

### **3. 4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif frekuensi untuk data-data kuantitatif dan analisis tematik untuk data-data kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan respon yang diperoleh dari pertanyaan terbuka yang tersedia di kuesioner.

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### a. Profil Responden.

Kepala Sekolah yang mengisi kuesioner ini adalah sebanyak 44 kepala sekolah, dari total 55 SMP negeri yang ada di Kota Makassar. Dari 44 kepala sekolah tersebut, 27 diantaranya adalah kepala sekolah yang sekolahnya terakreditasi A, 8 sekolah terakreditasi B, 5 sekolah terakreditasi C, dan 4 sekolah yang belum terakreditasi. Profil kepala sekolah berdasarkan status akreditasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Profil Kepala Sekolah Berdasarkan Status Akreditasi Sekolah

No	Status Akreditasi Sekolah	Jumlah	%
1	A	27	61.4%
2	B	8	18.2%
3	C	5	11.4%
4	Belum Terakreditasi	4	9.1%
	Total	44	100%

Karakteristik berdasarkan masa jabatan bisa dilihat pada Tabel 4.2. Terlihat bahwa terdapat 1 kepala sekolah merupakan PLT, 3 orang dengan masa jabatan 1 – 2 tahun, 11 orang dengan masa jabatan 3 – 4 tahun, dan sisanya sebanyak 29 orang adalah kepala sekolah dengan masa jabatan lebih dari 4 tahun.

Tabel 4.2. Profil Kepala Sekolah berdasarkan Masa Jabatan

No	Masa Jabatan	Jumlah	%
1	1 – 2 tahun	3	6.8
2	3 – 4 tahun	11	25.0
3	> 4 tahun	29	65.9
4	PLT	1	2.3
	Total	44	100%

Berdasarkan Tabel 4.2. tersebut terlihat bahwa sebagian besar Kepala SMP Negeri di Kota Makassar sudah menjabat lebih dari 4 tahun, yaitu sebesar 65.9% (29 orang).

#### **b. Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian teknik pengumpulan data, aspek pertama yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman kepala sekolah terhadap masing-masing program Revolusi Pendidikan tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepala sekolah menyatakan bahwa sebagian besar mereka berada pada kategori paham (skor 3) dan sangat paham (skor 4) terkait 18 Program Revolusi Pendidikan tersebut. Secara rinci, persepsi kepala sekolah mengenai tingkat pemahaman mereka dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pemahaman Kepala Sekolah terhadap 18 Program Revolusi Pendidikan

No	Program	Tingkat Pemahaman							
		1		2		3		4	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Semua anak bisa sekolah	0	0.0	0	0.0	12	27.3	32	72.7
2	Semua sekolah Adiwiyata	0	0.0	1	2.3	11	25.0	32	72.7
3	Semua bebas NAPZA	0	0.0	0	0.0	12	27.3	32	72.7
4	Sekolah terintegrasi 9 tahun	0	0.0	2	4.5	22	50.0	20	45.5
5	Pembangunan 100 Sekolah Berbintang Lima	1	2.3	11	25.0	21	47.7	11	25.0
6	1 sekolah 1 Smart Library	0	0.0	0	0.0	22	50.0	22	50.0
7	1 sekolah 2 guru innovator	0	0.0	1	2.3	20	45.5	23	52.3
8	1 sekolah 5 super student	0	0.0	2	4.5	21	47.7	21	47.7
9	1 sekolah 2 smart class	0	0.0	0	0.0	27	61.4	17	38.6
10	1 sekolah 1 super inovasi	0	0.0	2	4.5	22	50.0	20	45.5
11	1 sekolah 5 gang debat	0	0.0	2	4.5	22	50.0	20	45.5
12	1 anak 1 tari	0	0.0	0	0.0	10	22.7	34	77.3
13	1 anak 1 bakat	0	0.0	0	0.0	10	22.7	34	77.3
14	1 anak 1 olahraga	0	0.0	0	0.0	10	22.7	34	77.3
15	1 anak 3 tanaman	0	0.0	0	0.0	12	27.3	32	72.7
16	Festival Bakat	0	0.0	0	0.0	20	45.5	24	55.5
17	Olimpiade Sekolah	0	0.0	4	9.1	20	45.5	20	45.5
18	Liga debat	0	0.0	2	4.5	21	47.7	21	47.7

c. Implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan

Tabel 4. 4. Implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan

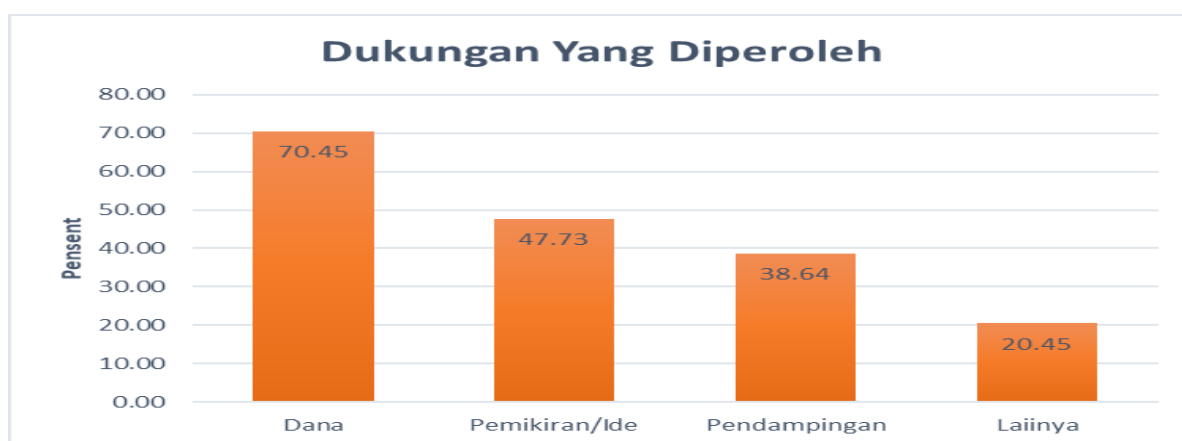
No	Program	Tingkat Implementasi													
		0		1		2		3		4		5		6	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Semua anak bisa sekolah	0	0.0	1	2.3	0	0.0	7	15.9	7	15.9	9	20.5	20	45.0
2	Semua sekolah Adiwiyata	1	2.3	8	18.2	6	13.6	11	25.0	2	4.5	8	18.2	8	18.2
3	Semua bebas NAPZA	0	0.0	0	0.0	2	4.5	9	20.5	4	9.1	16	36.4	12	27.3
4	Sekolah terintegrasi 9 tahun	6	13.6	10	22.7	4	9.1	9	20.5	4	9.1	7	15.9	4	9.1
5	Pembangunan 100 Sekolah Berbintang Lima	7	15.9	8	18.2	6	13.6	7	15.9	5	11.4	7	15.9	4	9.1
6	1 sekolah 1 Smart Library	1	2.3	4	9.1	6	13.6	14	31.8	7	15.9	5	11.4	7	15.9
7	1 sekolah 2 guru innovator	1	4.5	2	11.4	5	29.5	13	20.5	9	20.5	9	9.1	4	97.7
8	1 sekolah 5 super student	1	2.3	3	6.8	6	13.6	15	34.1	8	18.2	7	15.9	4	9.1
9	1 sekolah 2 smart class	0	0.0	8	18.2	9	20.5	15	34.1	2	4.5	7	15.9	2	4.5
10	1 sekolah 1 super inovasi	0	0.0	11	25.0	2	4.5	10	22.7	6	13.6	12	27.3	2	4.5
11	1 sekolah 5 gang debat	3	6.8	5	11.4	8	18.2	13	29.5	8	18.2	3	6.8	4	9.1
12	1 anak 1 tari	0	0.0	2	4.5	2	4.5	12	27.3	8	18.2	12	27.3	7	15.9
13	1 anak 1 bakat	0	0.0	2	4.5	7	15.9	9	20.5	7	15.9	13	29.5	5	11.4

14	1 anak 1 olahraga	0	0.0	2	4.5	4	9.1	10	22.7	10	22.7	11	25	7	15.9
15	1 anak 3 tanaman	0	0.0	4	9.1	0	0.0	16	36.4	9	20.5	9	20.5	6	13.6
16	Festival Bakat	0	0.0	2	4.5	6	13.6	9	20.5	11	25	12	27.3	4	9.1
17	Olimpiade Sekolah	1	2.3	5	11.4	7	15.9	9	20.5	10	22.7	8	18.2	4	9.1
18	Liga debat	3	6.8	7	15.9	8	18.2	9	20.5	6	13.6	6	13.6	3	6.8

#### d. Bentuk Dukungan yang telah Diperoleh

Gambar 4.1. memperlihatkan presentase tentang bentuk dukungan yang diperoleh. Terdapat 4 pilihan yang disediakan di kuesioner, yaitu, dukungan (1) dana; (2) Pemikiran/Ide; (3) Pendampingan; (4) Lainnya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa 31 sekolah (70.45%) sekolah menyatakan bahwa mereka memperoleh dukungan dana untuk mengimplementasikan Program Revolusi Pendidikan. Namun, ketika ditanyakan kembali, dukungan dana yang dimaksud adalah dana BOS yang sudah tersedia, dan bukan bantuan khusus terkait Program Revolusi Pendidikan. Sedangkan untuk ide/pemikiran, sebanyak 21 sekolah (47.73%) menyatakan bahwa mereka memperoleh dukungan tersebut, dan 17 sekolah (38.64%) menyatakan bahwa mereka diberikan pendampingan untuk implementasi Program Revolusi Pendidikan.

Gambar 4.1. Bentuk Dukungan yang Diperoleh

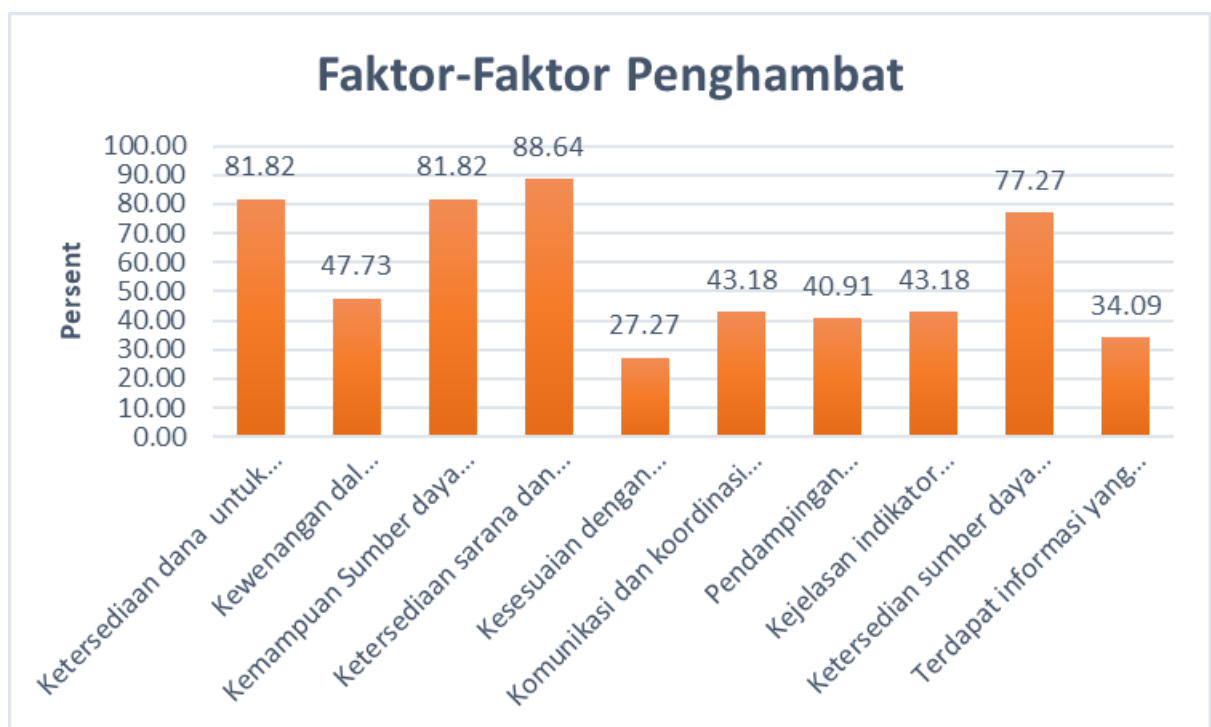




#### e. Faktor-Faktor Penghambat

Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor penghambat yang menurut sekolah berdampak terhadap implementasi Program Revolusi Pendidikan di tingkat sekolah. Terdapat 10 pilihan yang disediakan di kuisioner yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang di atas 75% sekolah pilih, yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi Program Revolusi Pendidikan, yaitu: ketersediaan dana (81.8%); kemampuan sumber daya sekolah (81.8%), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (88.6%), dan ketersediaan sumber daya teknologi di sekolah (77.3%). Hasil analisis terkait faktor penghambat ini dapat dilihat pada Gambar 4.2. tentang faktor-faktor penghambat implementasi Program Revolusi Pendidikan.

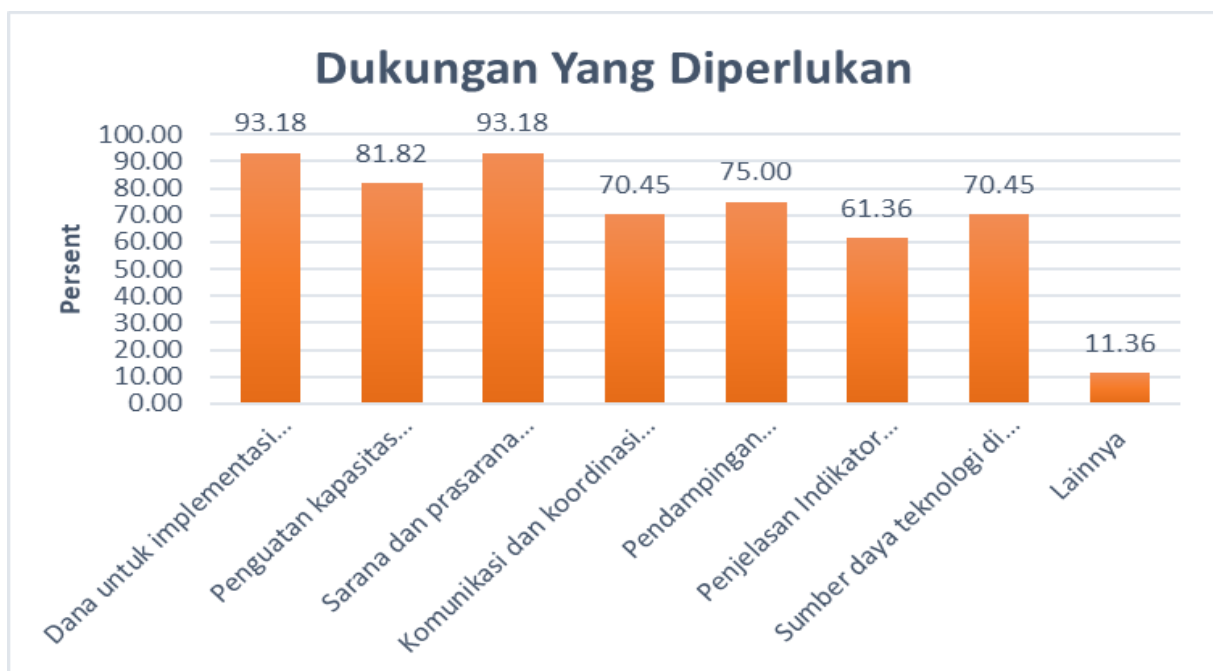
Gambar 4.2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi



#### f. Bentuk Dukungan yang Diperlukan

Aspek terakhir yang ditanyakan dalam penelitian ini adalah bentuk dukungan apa yang dibutuhkan untuk Implementasi Program Revolusi Pendidikan ini. Terdapat 7 bentuk dukungan yang bisa dipilih oleh kepala sekolah, dan bentuk dukungan yang diharapkan secara umum di atas 70% untuk setiap bentuk dukungan, kecuali pada item tentang kejelasan indikator (61.4%). Bentuk dukungan lain yang dianggap perlu adalah (1) adanya wadah untuk implementasi bersama; (2) partisipasi Dunia Usaha dan Dunia Industri; (3) Peran masyarakat dan Komite Sekolah; (4) implementasi yang sifatnya berjenjang dan kontinyu; dan (5) komitmen dari kepala sekolah dan guru. Gambar 4.3. memperlihatkan bentuk dukungan yang diperlukan secara lebih rinci.

Gambar 4.3. Bentuk Dukungan yang Diperlukan



#### g. Gambaran Implementasi Program

Salah satu komponen survei yang ditanyakan dalam penelitian ini adalah tingkat implementasi masing-masing program yang menggunakan skala semantik, pilihan 1 sampai dengan 6. Kepala sekolah juga diminta untuk menuliskan kegiatan-kegiatan apa yang telah mereka lakukan yang menggambarkan tingkat implementasi tersebut. Data kualitatif yang diperoleh dari pertanyaan terbuka terkait implementasi setiap program menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara level yang satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian menemukan bahwa sekolah berusaha menindaklanjuti 18 Program Revolusi Pendidikan tersebut namun setiap sekolah memiliki titik awal yang berbeda tergantung dengan kondisi dan situasi sekolah. Misalnya untuk program Sekolah Adiwiyata, beberapa sekolah

memang sudah mulai melakukan program ini sejak awal sehingga mereka sudah bisa sampai pada tingkat Provinsi bahkan nasional. Hal berbeda terjadi pada sekolah yang memang baru mulai untuk melaksanakan program Adiwiyata tersebut.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi yang dilakukan oleh sekolah cukup bervariasi tergantung dari ketersediaan sumber daya dan dana sekolah, dan karakteristik masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyatakan bahwa mereka berusaha menindaklanjuti kebijakan Revolusi Pendidikan tersebut, namun mereka tidak mengetahui apakah yang telah mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut atau tidak.

Hasil analisis menemukan bahwa sekolah lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya teknis dalam implementasi Revolusi Pendidikan. Sebagai contoh, untuk Program Satu Anak 3 Tanaman. Berdasarkan penjelasan di Buku 18 Revolusi Pendidikan, program ini bukan hanya sekedar memastikan siswa menanam tanaman jangka Panjang. Salah satu tujuan utama yang diharapkan adalah siswa belajar tentang fase kehidupan melalui tanaman yang dirawat dan menjadi tanggung jawabnya. Untuk memastikan tercapainya hal ini, sekolah seharusnya tidak hanya fokus pada ketersediaan tanaman saja, tapi kemudian apa aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan agar pembelajaran tentang fase kehidupan ini dapat dialami oleh siswa. Hal yang sama juga ditemukan pada program-program lainnya seperti Program Super Student, Gang Debat, Satu Anak 1 Tari, dan Satu Anak 1 olahraga.

#### **4.2. Pembahasan.**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kepala sekolah tentang pemahaman kepala sekolah terkait 18 Program Revolusi Pendidikan memperlihatkan bahwa mereka berada dalam kategori paham dan sangat paham. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase kepala sekolah yang memilih kategori paham (sekitar 45%) dan kategori sangat paham (55%). Namun ketika dilakukan validasi melalui proses wawancara, pemahaman dalam perspektif kepala sekolah adalah mereka memahami apa yang dimaksud dengan masing-masing program tersebut. Misalnya untuk program 1 sampai dengan 5, dan program 11 sampai dengan program ke - 18

Pada pengukuran implementasi, sebagian besar kepala sekolah memilih skor 3 dari 6 skor yang disediakan dari 1 sampai 6. Karena pengukuran ini dilakukan berdasarkan persepsi kepala sekolah terhadap tindak lanjut yang mereka lakukan, subjektivitas pemahaman kepala sekolah tentang ketercapaian program cukup terlihat dari respon yang mereka berikan tentang

kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan. Hasil FGD juga memperlihatkan bahwa apa sebenarnya yang diharapkan dari sekolah untuk menindaklanjuti Program Revolusi Pendidikan ini tidak terkomunikasikan dengan baik, terutama untuk Program Nomor 6 sampai dengan 10, yaitu Smart Library, Guru Inovator Super Student, Smart Class, dan Super Inovasi. Bahkan untuk Smart Library, ukuran yang digunakan adalah akreditasi perpustakaan, jika sudah mencapai akreditasi A, maka sekolah beranggapan bahwa mereka telah memenuhi Standar Smart Library.

Menurut Akib (2010), implementasi kebijakan adalah tentang menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan juga diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Karenanya untuk mengukur kekuatan dari sebuah kebijakan, dapat dilihat melalui a) besarnya dana yang dialokasikan; (b) kejelasan kebijakan, konsistensi, frekuensi pelaksanaan, dan apakah kebijakan itu diterima atau dipahami dengan benar.

Hasil penelitian ini memperlihatkan minimnya pola koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan dan Sekolah. Terdapat dikotomi yang terjadi dimana Pemerintah Kota berperan sebagai instansi yang mengeluarkan kebijakan, dan sekolah berperan sebagai mitra pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun terdapat kesenjangan yang terjadi, karena tidak adanya koordinasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memastikan sekolah memahami dengan benar Program Revolusi Pendidikan ini. Selain itu, alokasi dana dan kejelasan kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk menterjemahkan dan menindaklanjuti sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hal ini berdampak terhadap munculnya multi interpretasi tentang apa sebenarnya yang diharapkan dari sekolah dengan adanya kebijakan Program Revolusi Pendidikan ini.

Menurut Akib (2010) terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan alur kerja birokrasi. Dari perspektif proses, sebuah program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai petunjuk dan ketentuan yang dibuat pembuat kebijakan. Sedangkan dari perspektif hasil, sebuah program dinilai berhasil jika program tersebut memberikan dampak seperti yang diinginkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, sebagai sebuah ide, Program Revolusi Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar. Namun masih ditemukan adanya kendala pada proses komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan alur kerja birokrasi antara pemerintah kota dan sekolah sebagai unit pelaksana teknis.

Salah satu unsur penting yang perlu dimaksimalkan perannya dalam implementasi Revolusi Pendidikan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dinas Pendidikan Kota Makassar memegang peranan penting dalam implementasi 18 Revolusi Pendidikan ini. Hasil wawancara menemukan bahwa sekolah merasa bahwa Dinas Pendidikan juga tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai Revolusi Pendidikan ini. Proses penyampaian informasi, kejelasan informasi yang disampaikan mengenai Revolusi Pendidikan dirasakan sangat terbatas. Padahal Dinas Pendidikan Kota Makassar merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar dalam implementasi kebijakan di sektor pendidikan. Komitmen Dinas Pendidikan sebagai pelaksana menjadi sangat krusial dalam implementasi Revolusi Pendidikan ini. Hal ini perlu diikuti dengan struktur birokrasi di internal Dinas Pendidikan yang mengacu pada prosedur operasional kerja yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Dan hal ini lah yang menurut kepala sekolah tidak tersedia, sehingga sekolah akhirnya melaksanakan Revolusi Pendidikan ini berdasarkan perspektif masing-masing.

Kajian tentang 18 Revolusi Pendidikan berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar menemukan bahwa terdapat konsep yang tidak terkomunikasikan dengan baik terkait dengan tujuan diadakannya 18 Program Revolusi Pendidikan tersebut. Kepala Sekolah lebih banyak fokus pada nama program dan kurang terinformasikan mengenai tujuan utama dari program tersebut. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya penjelasan mengenai indikator capaian dan bagaimana program-program tersebut terkait satu sama lainnya. Penjelasan mengenai tujuan dari masing-masing program, petunjuk teknis, kejelasan indikator capaian dan pendampingan, perlu disediakan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai bagian dari struktur Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab pada pengelolaan pendidikan di Kota Makassar.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

- Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kepala sekolah terhadap tingkat pemahaman mereka berada pada kategori paham dan sangat paham. Namun, tingkat pemahaman ini tidak linier dengan implementasi yang mereka lakukan. Berdasarkan skala semantik 1 – 6 yang diberikan, sebagian besar kepala sekolah memilih skor 3 terkait implementasi masing-masing program.
- Hasil penelitian juga menemukan bahwa sekolah memperoleh dukungan untuk implementasi dalam bentuk ide, pemikiran, dan pendampingan. Namun sekolah juga menyatakan bahwa pemerintah kota dalam hal ini dinas pendidikan hampir tidak pernah memberikan pendampingan khusus terkait implementasi Program Revolusi Pendidikan.
- Faktor penghambat utama yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi program adalah ketersediaan dana, kemampuan sumber daya sekolah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat mengimplementasikan Program Revolusi Pendidikan, sekolah membutuhkan alokasi dana khusus, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, dukungan sarana dan prasarana, termasuk pendampingan implementasi program oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan dukungan sumber daya teknologi diperlukan agar Program Revolusi Pendidikan ini dapat ditindaklanjuti di tingkat sekolah.
- Dinas Pendidikan sebaiknya mengambil peran sebagai mediator yang dapat menterjemahkan kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar di sektor pendidikan dan melakukan pendampingan yang terstruktur bagi sekolah. Pendampingan ini hanya dapat dilakukan jika Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Revolusi Pendidikan ini. Internal Dinas Pendidikan perlu melakukan sistem penugasan yang sifatnya spesifik terkait implementasi Revolusi Pendidikan di tingkat sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1), 1 – 11.
- Aithal, P.S. (2016). *Smart Library Models for Future Generations. International Journal of Engineering Research and Modern Education*, 1 (1), 693 – 703.
- Dinas Pendidikan Kota Makassar, dkk. (2017). *18 Revolusi Pendidikan*. Makassar: CV Manunggal Halim Jaya.
- Jufri, dkk. (2017). Revolusi Pendidikan SMP di Kota Makassar. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(2), 51 – 64.
- Kulaeno, Y.U (2018). *Inovasi Pemerintah Kota Dalam Program Revolusi Pendidikan (Studi Kasus SD Negeri Pannampu 1 Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Bacchi, C. (2009). *Analysing Policy: What's the problem representation to be?* NSW: Pearson Australia.
- Idris, R., & Lestari, E. (2017). Pengaruh pengorganisasian terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Inpres Bangkala II Kota Makassar. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 20 (1), 18 – 30.
- Makassar Today (2016). *Danny Urai 18 Revolusi Pendidikan di Makassar*. Diunduh pada tanggal 21 Maret 2022 dari <https://makassartoday.com/2016/06/27/danny-urai-18-revolusi-pendidikan-di-makassar/>.
- Makassar Terkini (2020). *Mutu Pendidikan, Kota Makassar Urutan Terendah di Sulsel*. Diunduh pada tanggal 1 April 2020 dari <https://makassar.terkini.id/mutu-pendidikan-kota-makassar-urutan-3-terendah-di-sulsel/>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (Permendikbud. No. 28/2016). Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Pollock, J.E. dkk. (2021). How Innovative Teachers Can Start Teaching Innovation. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 dari <https://www.ascd.org/el/articles/how-innovative-teachers-can-start-teaching-innovation>.
- Purnama, S. (2010). *Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.

- Presiden Republik Indonesia (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (UU. No.20/2003). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ramkumar, R., dkk. (2020). Design and Implementation of IOT based Smart Library Using Android Application. *Biosc. Biotech.Res.Commm. Special Issue 13*(3), 56 – 62.
- Tanwar, K. & Gupta, S. (2014). Smart Class Using Li-Fi Technology. *The International Journal of Engineering and Science*, 3 (7), 16 – 18.
- Wahab, S.A. (2016). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.





